

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT JULI 2012

Kegiatan DPR pada minggu keempat ini, kegiatan Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan kegiatan diplomasi parlemen, antara lain ditandai dengan Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV 2011-2012 tanggal 13 Juli 2012. Masa Persidangan I tahun 2012-2013 akan dibuka pada tanggal 16 Agustus 2012. Berikut ringkasan kegiatan DPR pada minggu keempat Juli 2012.

Rapat Paripurna 13 Juli 2012

Rapat Paripurna DPR tanggal 13 Juli 2012 mengagendakan 2 (dua) acara utama yaitu: [1] Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pendidikan Tinggi dan [2] Pidato Penutupan Masa Sidang IV 2011-2012. Selain itu ada laporan Badan Kehormatan DPR tentang pemberhentian sementara keanggotaan DPR atas nama Wa Ode Nurhayati dari Fraksi PAN karena telah menjadi terdakwa dalam kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Berkaitan dengan acara pengambilan keputusan atas RUU Pendidikan Tinggi, dilaporkan oleh Ketua Komisi X DPR-RI sebagai berikut: RUU ini telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I. RUU ini terdiri dari 12 bab dan 100 pasal dengan pokok-pokok pengaturan substansi, yaitu ketentuan umum, dasar, asas, fungsi dan tujuan; penyelenggaraan pendidikan tinggi; kerjasama internasional; penjaminan mutu; pengelolaan perguruan tinggi; kemahasiswaan; pengembangan perguruan tinggi; pendanaan dan pembiayaan pendidikan tinggi; penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga negara lain; dan peran serta masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam RUU Pendidikan Tinggi yang telah disahkan, dimaksudkan untuk memberikan jaminan: [1] penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan terjangkau, [2] pemerataan akses pendidikan tinggi, [3] relevansi penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan dunia kerja dan industri, yang berpihak kepada mahasiswa, dan hal-hal lain yang diatur, diantaranya: penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Ali



tinggi bermutu dan terjangkau oleh masyarakat, standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik berdasarkan capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi, indeks kemahalan wilayah. Juga diatur mengenai penerimaan mahasiswa melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan Pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa secara nasional. Penerimaan mahasiswa baru merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Perguruan tinggi wajib mencari dan menyaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal, untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.

Rapat Paripurna tanggal 13 ini telah memberikan persetujuan secara aklamasi terhadap RUU Pendidikan Tinggi yang telah dibahas secara intensif di dalam panitia kerja dengan seluruh dinamika dan romantikanya, dan telah menghasilkan sebuah rancangan yang maksimal mengenai RUU tentang Pendidikan Tinggi untuk disahkan menjadi UU.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna tanggal 12 Juli, DPR-RI telah menyetujui usulan Komisi IX atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk menjadi RUU DPR. Pembahasan lebih lanjut atas RUU ini akan dilakukan pada Masa Persidangan I tahun sidang 2012-2013. Pertimbangan diusulkannya RUU ini antara lain bahwa UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh, masih mengandung keti-

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra; Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

dakpastian hukum, pembagian tugas dan wewenang yang tidak proporsional antara Pemerintah dan swasta sehingga menimbulkan ketidakefektifan hukum dan sistem perlindungan dan pengelolaan yang kurang berpihak kepada pekerja Indonesia di luar negeri.

RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro yang telah ditangani oleh Komisi VI memasuki tahap pembahasan akhir dan diharapkan dapat dituntaskan pada Masa Persidangan I tahun sidang 2012-2013. RUU ini dimaksudkan untuk mendorong Lembaga Keuangan Mikro agar berkembang pesat tapi tetap sehat. Poin yang masih menjadi perdebatan antara lain perihal prosedur pemberian ijin operasional bagi Lembaga Keuangan Mikro. Sebagian pihak menginginkan agar ijin dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sedangkan pemerintah menginginkan ijin dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kesempatan pembahasan, baik DPR maupun Pemerintah berharap, ada standar yang sama, yang akan membuat para nasabah Lembaga Keuangan Mikro mendapat layanan terbaik.

Revisi UU tentang Pilpres dan Revisi UU MD3, sedang digarap oleh Badan Legislasi DPR dan diharapkan akan mulai dilakukan pembahasan setelah DPR memasuki Masa Persidangan I tahun sidang 2012-2013. Dalam UU ini sangat dimungkinkan untuk melibatkan Komisi II dalam pembahasan.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Badan Anggaran pada tanggal 12 Juli 2012 telah melakukan rapat Panja Perumus Kesimpulan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011 dan Panja Draft RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA.2011. Panja Perumus Kesimpulan LKPP Tahun 2011 antara lain membahas: (1) Hasil Pemeriksaan BPK; (2) Analisis dan Tindak Lanjut Pemerintah; (3) Kesepakatan dan Rekomendasi Panja.

Sehubungan tanggal 14 Juli 2012 s.d 15 Agustus 2012 adalah Masa Reses DPR, pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA.2011 dilanjutkan pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2012 – 2013 yang direncanakan tanggal 28 Agustus 2012 dilakukan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam Pidato Penutupan Sidang IV tanggal 13 Juli, Ketua DPR menyampaikan berbagai perkembangan, khususnya di bidang politik dan keamanan. Dewan menyampaikan keprihatinan terkait masalah keamanan di Papua yang belakangan ini kembali diwarnai aksi kekerasan yang telah menimbulkan sejumlah korban, baik dari kalangan aparat bersenjata, turis asing, PNS, pelajar, dan masyarakat.

Dewan mendukung penegasan Presiden bahwa harus diciptakan Papua yang menjadi tanah damai. Untuk menciptakan Papua tanah yang damai, maka Pemerintah perlu melakukan dialog dengan rakyat Papua untuk mendengarkan permasalahan yang terjadi di sana. Proses dialog ini pernah kita lakukan pada saat terjadinya konflik di Aceh bebe-

rapa waktu yang lalu. Tetapi satu hal yang perlu kita sepakati bahwa tanah Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Ketua DPR selanjutnya mengatakan, bahwa di bidang penegakan hukum, saat ini banyak kasus-kasus hukum yang menarik perhatian publik. Diantara sejumlah kasus hukum tersebut ada kasus yang bersinggungan dengan DPR karena keterlibatan oknum anggota DPR dalam kasus pelanggaran hukum.

Semua sepakat bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan, bahkan ada yang mengkategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Hal ini bisa dipahami karena dampak daripada korupsi adalah menumbuhkan suatu ketidakadilan dan hilangnya kesempatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara untuk maju. Korupsi membonsai keadilan sosial, karena mengambil hak rakyat, hak masyarakat untuk menikmati kemajuan.

Banyak kasus-kasus korupsi yang tengah diproses oleh KPK dan lembaga penegak hukum. Kita berharap KPK dan lembaga penegak hukum bekerja secara profesional dalam penegakan hukum, tanpa diintervensi oleh kekuatan di luar hukum. Selanjutnya, kita mendorong agar KPK mampu independen dan tidak tebang pilih, atau bahkan memainkan politik hukum yang justru membuat upaya pemberantasan korupsi berjalan mundur.

Ketua juga menyampaikan bahwa, Dewan menyoroti masalah Program Wajib belajar 12 tahun yang dilaksanakan tahun 2013. Program ini dapat dilihat dari postur anggaran yang menjadi keputusan bersama antara Pemerintah dengan DPR. Anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) UUD Tahun 1945, Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Dengan adanya kesepakatan untuk melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun pada tahun 2013, Dewan meminta Pemerintah menyegerakan revisi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mendapatkan pendidikan.

Selain itu, Ketua DPR mengatakan bahwa umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadhan dan akan melaksanakan Ibadah Puasa Ramadhan selama satu bulan penuh. Menghadapi Bulan Suci ini, Pimpinan Dewan meminta perhatian Pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Dewan mendorong Pemerintah untuk terus melakukan pemantauan, agar kenaikan harga bahan pokok yang terjadi masih dalam batas wajar. Dewan mengharapkan pemerintah tetap memiliki porsi intervensi yang cukup besar untuk mengontrol pangan. Mengenai masalah ketertiban dan keamanan, Dewan mengharapkan agar pemerintah menyiapkan aparatnya untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dewan juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga kerukunan dan toleransi sepanjang bulan Ramadhan yang akan datang.

Dedi Gumelar : Pendidikan Sebaiknya Disentralisasi Ke Pusat

Anggota Komisi X DPR RI Dedi Suwandi Gumelar mengatakan, bangsa kita terlalu gegabah mengotonomikan pendidikan. Padahal pendidikan sebagai dasar pembangunan manusia tidak seharusnya diotonomikan.



Anggota Komisi X DPR RI Dedi Suwandi Gumelar

Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Rabu (18/7) dalam serangkaian kunjungan kerja Komisi X DPR yang dipimpin Ketua Komisi X Agus Hermanto,

Dedi menambahkan, saat berlakunya otonomi daerah, ada lima instansi yang tetap di bawah pusat yakni bidang hukum, agama, pertahanan, keuangan moneter dan hubungan internasional.

Namun seiring berlakunya otonomi daerah, timbul kendala-kendala yang dihadapi dalam bidang pendidikan. Seharusnya, katanya, untuk bidang pendidikan ini tetap dipegang pusat, karena pendidikan mempunyai posisi sangat vital sebagai dasar pembangunan manusia.

“Bagaimana tidak gegabah, sementara otonomi ini lagi trial and error, baru belajar naik sepeda sudah diotonomikan,” katanya.

Seharusnya bangsa kita belajar otonomi dulu, setelah belajar dengan

baik baru mengotonomikan.

Dalam kenyataannya di lapangan, implementasi otonomi bidang pendidikan ini banyak menyulitkan menteri. Karena menteri tidak punya kaki di bawah, titik berat pendidikan di satu daerah ada pada Kepala Dinas setempat, bahkan gubernur pun tidak memiliki wewenang.

“Saya selalu berteriak di Komisi X agar mensentralisasikan kembali pendidikan, minimal guru dulu, supaya tidak terkotak oleh kepentingan politik lokal,” kata Dedi.

Bagaimana tidak untuk kepentingan politik lokal, ketika diketahui salah seorang Kepala Dinas tidak mendukung tim sukses calon gubernur/walikota/bupati, maka Kepala Dinas tersebut tiba-tiba dimutasi tanpa sebab yang jelas.

Padaahal, tambahnya, Kepala Dinas tersebut orang yang betul-betul menguasai dibidangnya. Sementara penggantinya, orang yang belum menguasai bidang tersebut.

“Bagaimana dia bisa menjadi Ke-

pala Dinas yang professional kalau tadinya dia ditempatkan di pertamanan, ini kan tidak mitmatch dan ini persoalan yang sangat mendasar,” katanya.

Sentralisasi dalam bidang pendidikan ini tentunya perlu mendapat perhatian serius, karena sekarang tidak lebih 20 persen dari kurang lebih 400 kabupaten yang kurang berhasil.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah Edi Susanto mengatakan, pasca diberlakukannya UU Otonomi Daerah, kendala-kendala yang dihadapi untuk bidang pendidikan khususnya terkait dengan kewenangan, tanggung jawab, variasi struktur organisasi/kelembagaan dan pemerataan SDM berkualitas.

Sebagai contoh, sangat sulit memindahkan guru yang berkualitas untuk ditempatkan di daerah lain yang memang membutuhkan guru tersebut. Akibatnya, banyak daerah untuk mata pelajaran tertentu yang kekurangan guru, sementara ada daerah lain yang kelebihan guru.

Begitu juga halnya dengan perguruan tinggi di daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan perguruan tinggi dalam membiayai dan mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama bagi perguruan tinggi swasta yang kecil.

Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut adalah memberikan fasilitas kegiatan bagi perguruan tinggi, seperti fasilitasi kegiatan pelatihan kewirausahaan mahasiswa, kegiatan lomba karya tulis inovatif mahasiswa, kegiatan penelitian inovatif mahasiswa, fasilitasi KKN di desa dan fasilitasi penelitian terapan. (tt) foto: tt

Ketua DPR Prihatin Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Lembaga DPR RI

Ketua DPR RI, Marzuki Alie prihatin persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga DPR RI, hanya karena ulah segelintir Anggota DPR RI yang terlibat tindak pidana korupsi, masyarakat mengkonotasikan satu lembaga DPR RI sebagai sarang koruptor. Padahal belum tentu semua anggota DPR RI melakukan korupsi.



Ketua DPR RI Marzuki Alie memberikan sambutan dalam acara Family Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI di Nuansa Bali Hotel, Anyer.

“Jangan sampai satu dua orang yang terlibat korupsi, seolah-olah semua Anggota DPR Korupsi. Belum tentu semua Anggota DPR korupsi. Begitu juga yang dikomisi, belum tentu semua melakukan korupsi. Padahal anggota legislatif yang terlibat hanya segelintir orang, tapi opininya seolah-olah dipandang sebagai satu lembaga yang korupsi,” ungkap Marzuki Alie saat membuka acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR di Anyer, Banten, Sabtu malam (14/7).

Ia menjelaskan, apa yang dipersepsikan oleh lembaga survei bahwa DPR itu lembaga terkorup bukanlah sebuah fakta. Menurutnya, itu hanya persepsi. Persepsi yang dibangun melalui opini, lalu dikembangkan publikasi secara masif. Tiap hari berita DPR korupsi, lalu muncul opini DPR sarang koruptor. Tapi itu bukan fakta. Masyarakat tidak paham kalau itu polling

“Kalau dibilang maling, dimana-mana ada. Dikampung kita juga ada maling, tapi jangan mengkonotasikan kampung itu kampung maling” tegas



Suasana pembukaan Family Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI di Nuansa Bali Hotel, Anyer.

Marzuki Alie.

Ketua DPR juga mengkritik pengamat dan pakar dari perguruan tinggi yang tidak berpikir jernih dalam menyampaikan penilaiannya terhadap DPR. Menurut Marzuki, mereka mengkritik DPR sebagai lembaga sarang koruptor, tapi giliran disebut banyak

koruptor itu berasal dari alumni perguruan tingginya marah.

“Kalau menyangkut koruptornya adalah alumni perguruan tingginya mereka berpikir waras, tapi kalau menilai DPR, mereka tidak berpikir waras,” tegas Marzuki. (ddg). foto:parle

Anggaran Fakir Miskin Harus Dikelola Satu Atap

Upaya mengintegrasikan penanganan fakir miskin masih harus terus menerus dilakukan, salah satunya adalah anggaran penanganan fakir miskin dari pusat yang terbagi ke berbagai tempat harus dikelola satu atap di bawah kendali Kementerian Sosial.



Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah saat memimpin rapat bersama Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ubaidillah Ahmad di kantor Gubernur, Palangkaraya.



Suasana pertemuan Tim Kunker Komisi VIII dengan penghuni PSTW Sinta Rangkang

“Undang-undang mengarahkan kepada Kementerian Sosial itu untuk menjadi leading sector. Saya kira kalau itu ditangani dalam satu policy begitu kita dapat mengukur

seberapa banyak sesungguhnya alokasi anggaran kita untuk penanganan kemiskinan, distribusinya di mana saja, sampai kemudian kita bisa melacak ke daerah.” kata Ketua Komisi VIII DPR

Ida Fauziah usai melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Ubaidillah Ahmad beserta jajarannya di Kantor Gubernur Palangkaraya, Senin (16/7).

Perkembangan kondisi sosial, strategi dan mekanisme sistem penanganan masalah sosial Provinsi Kalteng menarik perhatian tim kunjungan kerja Komisi VIII yang kemudian melanjutkan kunjungan ke Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang (PSTW Sinta Rangkang) di Kecamatan Bukit Batu Palangkaraya.

DPR bersama pemerintah telah menetapkan UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Yang seharusnya diiringi juga dengan peningkatan anggaran penanganan fakir miskin. Tapi sampai saat ini anggaran Kementerian Sosial masih sangat terbatas. Permasalahan ini mengemuka pada saat dialog Tim Kunker dengan Kepala Dinas Sosial Palangkaraya dan Pengurus Panti Werdha yang dipimpin Wakil ketua Komisi VIII Chairunnisa.

Dinas Sosial Palangkaraya dan Pengurus Panti Werdha merasa bersyukur telah mendapat APBD kurang lebih sebesar 7 milyar. Harapan dengan anggaran tersebut bisa merenovasi panti ini dari APBD. Menurut mereka sekarang ini untuk renovasi itu tidak ada lagi anggaran dari APBN. Dulu memang ada dari APBN, sekarang ini setelah otomi daerah tidak ada lagi dari dana APBN untuk hal itu.

Sementara itu Komisi VIII DPR dalam kunjungan ke PSTW Sinta Rangkang merasa terkesan dengan pengelolaannya. Panti yang dibangun secara bertahap sejak tahun 1980 ini memiliki kapasitas untuk dihuni 100 orang lansia dan saat ini terdapat 85 orang lansia yang tinggal di dalamnya. Panti ini dibawah naungan pemprov melalui Dinas Sosial Provinsi. Inilah yang diapresiasi oleh Komisi VIII. (ray) foto:ry

UU Dikti : Pemerintah Bertanggungjawab Sediakan Dana Perguruan Tinggi

Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak hanya mengatur soal otonomi pengelolaan perguruan tinggi saja baik akademik maupun non akademik, namun juga mengatur tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam APBN. Pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam APBD.

Demikian disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto saat pertemuan dengan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Rektor Perguruan Tinggi Swasta Jawa Tengah, Senin (16/7) di Gedung Rektorat Universitas Negeri Semarang.

Agus mengatakan, UU Pendidikan Tinggi sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi yaitu untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.

Agus mengakui, UU ini memang belum sempurna, tapi UU ini dapat disempurnakan di Peraturan Pemerintah (PP).

Undang-Undang Perguruan Tinggi ini juga banyak memberikan ruang untuk Perguruan Tinggi Swasta. Seperti anggaran Litbang, yang bukan hanya untuk PTN saja, tapi PTS pun dapat mengajukan anggaran itu.

Agus menambahkan, setelah menyelesaikan RUU Pendidikan Tinggi, Komisi X DPR juga sedang membahas RUU Pendidikan Kedokteran yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa sidang mendatang.

Sekarang ini, kata Agus, masih ada dua RUU yang saat ini masih dalam tahap perumusan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu RUU Kebudayaan dan RUU Sistem Perbukuan Nasional.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, Komisi X DPR RI Periode 2009-2010 sampai saat ini telah menyelesaikan beberapa undang-undang yaitu, Undang-undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan UU No. 11 Tahun



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto saat pertemuan dengan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Rektor Perguruan Tinggi Swasta Jawa Tengah di Gedung Rektorat Universitas Negeri Semarang

2010 tentang Cagar Budaya.

Agus menambahkan, kunjungan Komisi X DPR ke Jawa Tengah ini bertujuan untuk mendapatkan data-data faktual berupa masukan-masukan terkait dengan capaian, masalah dan kendala pembangunan dalam bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif pemuda dan olahraga dan perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, Rektor Universitas Negeri Semarang Suyono Sastroatmojo mengapresiasi disahkannya UU tentang Pendidikan Tinggi. Dengan disahkannya UU tersebut, ada kepastian hukum di dalam menjalankan Perguruan Tinggi.

Pada kesempatan tersebut berbagai persoalan juga banyak disampaikan para akademisi, seperti Bidik Misi yang hanya dinikmati PTN dan tidak banyak disampaikan ke Perguruan Tinggi Swasta sampai pada persoalan



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto

PTS yang kadang sering dianaktirikan atau mendapat perlakuan tidak adil.

Atas keluhan tersebut, Komisi X DPR merespon dengan baik dan segala masukan-masukan tersebut akan menjadi bahan saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan menteri dan jajarannya. (tt) foto:parle

Komisi VII DPR Soroti Pembangunan PLTU Gorontalo

Anggota Komisi VII DPR RI, Nur Yasin dari Fraksi PKB menyoroti persoalan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Gorontalo. Pasalnya, pembangunan PLTU Gorontalo pernah dijanjikan oleh Direksi PLN akan selesai Desember 2012 tetapi kenyataannya sampai saat ini pembangunan PLTU tersebut tidak berjalan.



Suasana pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR dengan PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali

“Ini saya buka catatan lama saya, terkait dengan pembangunan PLTU Gorontalo yang pernah dijanjikan dan itu saya catat,” kata Nur Yasin dalam pertemuan dengan PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo saat Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII DPR ke Provinsi Gorontalo, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali, Selasa (17/7).

“Kalau memang pembangunan PLTU itu bermasalah lalu apa permasalahannya kok bisa sampai berlarut-larut,” jelasnya.

Menurut anggota Tim Kunker Komisi VII Halim Kalla (F-PG), pembangunan PLTU Gorontalo gagal karena lokasi yang mau dibangun oleh PLTU itu bermasalah, dimana tanahnya masih diklaim oleh rakyat dan rakyat masih menuntut terus bahkan sampai masuk ke pengadilan. “Dalam pengadilan atas tanah itu rakyat menang, jadi disinilah letak permasalahannya,” jelas Halim.

la menambahkan, sejak awal tender itu para kontraktor sudah minta

pindah lokasi pembangunan PLTU tapi PLN sendiri tidak mau. “Kontraktornya pernah mengatakan, bahwa ini tidak bisa dikerjakan karena tanahnya PLN belum memberikan, jadi kontraktor dari dulu sudah meminta pindah lokasi tapi PLN tidak pernah memberikan suatu lokasi lain,” tegasnya.

Halim menambahkan, kontraktor bukannya tidak sanggup mengerjakan tapi permasalahan intinya adalah permasalahan tanah. “Apakah tanahnya rakyat yang tidak mau memberikan sehingga tidak bisa dibangun PLTU tersebut,” tambahnya.

Komisi VII DPR yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Lingkungan Hidup selalu bertanya tentang hal itu dalam sidang dan selalu dijawab akan selesai dalam waktu 2012, padahal kenyataannya PLN akan ambil alih dan akan menyelesaikan yang sampai sekarang belum selesai. “Jadi kalau kendalanya masalah tanah biar pun PLN mengambil alih saya rasa tidak akan beres-beres,” jelasnya.

Sementara itu, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah (F-PG) mengatakan, kalau PLTU dibangun dilokasi tersebut, sepertinya akan sulit karena energi primernya harus impor sehingga perhitungan energi primernya juga mahal sampai di daerah ini. “Jadi daerah disini sebenarnya untuk pengembangan pembangkitan lebih bagus menggunakan PLTG atau PLTA,” tuturnya.

Menjawab persoalan diatas, Pikner salah satu jajaran PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo menjelaskan, pembangunan PLTU ini tidak ada masalah. Kebetulan tanah yang didapat untuk pembangunan PLTU itu dari Pemda. “Tapi inilah kondisi di negara kita sekarang dimana-mana selalu ada kasus masalah tanah dan semua lokasi proyek pembangkit pasti digugat. Tidak bermimpi kita untuk mendapatkan tanah seluas 30 hektar dengan clear-clear amat”, kata Pikner.

Da menambahkan yang penting PLN akan menjalankan sebijak mungkin sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

“Pembangunan PLTU ini sudah hampir 90 persen, kami mohon do’a restunya mudah-mudahan saja awal 2013 selesai,”imbuhnya.

Kunjungan Kerja Komisi VII DPR kali ini di pimpin oleh Zainudin Amali dari Fraksi PG, tim Kunker membawa sekitar 12 orang anggota diantaranya, I Wayan Gunastra (F-PD), Didik Salmijardi (F-PD), Halim Kalla (F-PG), Arsyadjuliandi Rachman (F-PG), Gusti Iskandar Sukma Alamsyah (F-PG), Ismayatun (F-PDIP), Irvansyah (F-PDIP), Mastri Agoeng (F-PKS), Muhammad Syafrudin (F-PAN), Tommy Adrian Firman (F-PPP), Nur Yasin (F-PKB), dan Iqbal Alan Abdullah (F-Hanura).(iw)/foto:iwan armanias/parle.

Kemensos Patut Promosikan Relawan Sebagai Gaya Hidup

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi kepada relawan dari beberapa negara yang secara sukarela membantu anak jalanan di Yayasan Peduli Anak (YPA), Mataram, NTB. Pilihan menjadi relawan ini patut dipromosikan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada masyarakat luas terutama pemuda/remaja.

“Setiap orang pasti punya naluri ingin membantu sesama. Kementerian Sosial harus melihat peluang ini mempromosikan kegiatan menjadi relawan di institusi sosial yang dikelolanya. Jadikan relawan bagian dari gaya hidup,” kata anggota Komisi VIII, Sumaryati Aryoso di Lombok Barat, NTB, Senin (16/7/12).

Politisi dari FP Gerindra ini terlihat berdialog dengan Adel dari Perancis, So Young Park - Korea dan Thomas - Belanda. Pemuda dari negara berbeda ini mengaku mencari peluang menjadi relawan dari laman web. Mereka datang dengan biaya sendiri dan rata-rata bekerja sebagai relawan tanpa gaji selama 2 minggu sampai 2 bulan.

“Saya sudah beberapa kali jadi relawan di negara saya dan negara lain. Saya senang melakukannya,” kata Adel yang mengaku masih menyelesaikan kuliahnya di Perancis.

Sumaryati meyakini banyak anak bangsa Indonesia juga mempunyai mi-

nat sama pada kegiatan relawan yang sarat makna ini. Satu sisi membantu orang lain yang memerlukan, pada sisi lain pembuktian pada diri sendiri bisa bermanfaat bagi lingkungan. Kemensos yang mengelola banyak panti asuhan, panti sosial dan panti rehabilitasi lain dipastikan akan lebih baik apabila didukung relawan dari beragam kalangan.

Ketua Tim Kunker Komisi VIII Mahrus Munir mengatakan kegiatan sosial yang berlangsung di YPA desa Longko, Lombok Barat dapat menjadi contoh bagi banyak pihak. Upaya membantu anak jalanan yang sudah dirintis sejak tahun 2006 ini terus berkembang dengan sangat baik, bahkan menjadi percontohan terutama setelah dibantu Yayasan Family Koper dari Belanda.

“Peran serta masyarakat dalam mengelola anak-anak jalanan dan putus sekolah sangat diperlukan. Kami memberikan apresiasi kepada pengurus jangnan sampai upaya mulia ini terhenti,”

katanya memberi semangat.

Dalam kesempatan itu Tim Kunker Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan Program Asistensi Sosial 2012 kepada Yayasan Peduli Anak sebesar Rp.76.650.000,- untuk bantuan makanan setahun dan Rp.180.000.000,- berupa bantuan pendidikan untuk 100 anak selama setahun.

Tim Kunker diantaranya Kasma Bouty, Sayed Fuad Zakaria, Abdul Aziz Suseno, Endang Sukandar berkesempatan mengunjungi fasilitas pendukung yang dimiliki YPA seperti, ruang menjahit, bengkel pertukangan, ruang musik.

Ketua YPA Nurdiana menyambut baik bantuan pemerintah dan DPR yang menurutnya dapat menjaga kesinambungan pendidikan. “Terima kasih atas kunjungan DPR. Kami harap bantuannya bisa berkelanjutan sehingga program kami disini dapat mencapai tujuannya,” pungkasnya. (iky) foto: parle *



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI saat berdialog dengan relawan dari beberapa negara yang secara sukarela membantu anak jalanan di Yayasan Peduli Anak (YPA), Mataram, NTB

Komisi VII DPR Serap Masukan Lifting Minyak di Aceh

Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana mengatakan, kunjungan kerja Komisi VII ke Banda Aceh bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai lifting minyak, dimana saat ini mengalami penurunan karena itu perlu diadakan pertemuan dengan Kontrak Kerja Sama (KKS) guna melihat persoalan realnya di mata masyarakat.



Tim Kunker Komisi VII DPR RI photo bersama dengan jajaran Direksi PT. Arun.

“Kontribusi minyak bagi APBN relatif kecil dibandingkan tahun sebelumnya, karena itu kita ingin mengetahui berbagai aspek yang mempengaruhinya,” ujar Sutan saat Kunker ke Propinsi Aceh, di Hotel Hermes Banda Aceh, Senin malam, (17/7).

Menurut Sutan, Tim ingin menge-

tahui pengelolaan Blok B dan kegiatan offshore (lepas pantainya), produksi gas di blok tersebut, dan operasionalisasi blok tersebut serta program Corporate Social Responsibility (CSR).

Selain itu, saat bertemu dengan PT. PLN, lanjut Sutan, tim ingin mendapatkan masukan dan informasi terkini mengenai kondisi dan perkembangan

ketenagalistrikan di Propinsi Aceh diantaranya perkembangan dan status sistem pembangkitan di Propinsi Aceh, pengelolaan UJL, listrik desa serta besaran susut jaringan.

Pada Hari Selasa ini, Tim direncanakan akan bertemu dengan Gubernur Propinsi Aceh, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Dirjen Migas, Dirjen Ketenaga Listrikan, BP Migas, BPLHD, Bapedalda, Dinas Pertambangan dan Energi.

Siang harinya, Tim meninjau PLTD Apung, Museum Tsunami dan Mitigasi Bencana Aceh dan Kunjungan ke BAICC di Banda Aceh.

Pada Pukul 16.00 Sore harinya Tim akan mengadakan pertemuan dengan PT Pertamina dan BPH Migas membahas lebih detail mengenai persoalan Migas dan kendalanya dilapangan. (si)foto:parle

Koperasi Setjen DPR RI Terpilih Sebagai Koperasi Terbaik Tahun 2012

Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI terpilih sebagai Koperasi primer terbaik Tahun 2012 di wilayah DKI Jakarta. Koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI telah ditetapkan sebagai koperasi terbaik urutan 5 dari 342 koperasi primer fungsional.

Hal ini ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia DKI Jakarta No. 030/KPTS-V/VI/2012 tertanggal 4 Juni 2012 yang ditandatangani Ketua Umumnya, Sri Suprpto dan Sekretaris I Edhie Suprijanto.

Sebelumnya Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia DKI Jakarta melakukan rapat pemilihan Koperasi Terbaik Tahun 2012 pada 4 Juni 2012, dan memutuskan 10 Koperasi terbaik, salah satunya adalah Koperasi

Sekjen DPR RI.

Ke-10 koperasi terbaik yaitu, (1) Koperasi Kementerian Sosial, (2) Koperasi Kementerian Kehutanan, (3) Koperasi PT. Pos Indonesia Jakarta Pusat, (4) Koperasi Sekretariat Negera, (5) Koperasi Sekjen DPR RI, (6) Koperasi Kementerian Agama, (7) Koperasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Koperasi Kopda Jakarta Utara, (9) Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, dan (10) koperasi Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Ketua Koperasi Sekretariat Jenderal

DPR RI, Rahmad Budiadji mengucapkan terima kasih kepada Sekjen DPR RI yang telah melakukan pembinaan dan bimbingan, sehingga Koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI terpilih menjadi koperasi primer terbaik.

“Kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan pembinaan Ibu Sekjen selama ini, yang ditunjang oleh kerja kolektif pengurus, pengawas dan manajemen koperasi serta dukungan partisipasi aktif dari anggota,” kata Budiadji, di Jakarta, Senin (16/7) (ddg)

Komisi X Prihatinkan Kondisi Perpustakaan Sekolah di Jateng

Komisi X DPR RI memprihatinkan kondisi sejumlah perpustakaan disekolah-sekolah di Jawa Tengah khususnya di Semarang. Dari pantauan langsung di lapangan, perpustakaan tersebut kurang memenuhi syarat, dengan koleksi buku yang serba terbatas.

Pantauan ini dilakukan dalam serangkaian kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah, Rabu(18/7) yang dipimpin Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dedi. Suwandi Gumelar mengatakan, perpustakaan dapat dikatakan sebagai jendela dunia. Namun sangat disayangkan sekolah sebagai tempat mencari ilmu tidak ditunjang dengan perpustakaan yang memadai.

Padahal, katanya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 mengamanatkan 5 persen dari anggaran operasional sekolah dialokasikan untuk perpustakaan sekolah. Tapi kalau alokasi anggaran yang diberikan pada sekolah tersebut kecil bagaimana akan membaginya.

Pihak sekolah seharusnya dapat menayakan anggaran 5 persen tersebut pada Dinas Pendidikan setempat.

Saat meninjau perpustakaan SMAN 1 Ungaran Kabupaten Semarang, Dedi sempat mengkritik tulisan "Library" yang ditempel di atas pintu masuk.

Dedi menanyakan kenapa harus menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Seharusnya, sekolah mengajarkan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional karena itu juga diamanatkan dalam undang-undang.

SMAN 1 Ungaran merupakan salah satu Rintisan Sekolah Berstandart Internasional (RSBI) dimana Ketua Komisi X DPR salah satu alumni sekolah tersebut.

Selain mengunjungi SMAN 1 Ungaran, Komisi X DPR juga mengunjungi TKN Bendungan, SDN Bendungan, SMPN 12 dan SMKN 8.

Komisi X DPR melihat hampir seluruh perpustakaan yang dikunjungi



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto dan rombongan meninjau SMAN 1 Ungaran, Semarang Jawa Tengah

kurang memenuhi persyaratan sebagai perpustakaan sekolah.

Di tempat berbeda, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jateng Andriani mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi perpustakaan di daerahnya adalah terbatasnya pendanaan untuk pengembangan perpustakaan, terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan khususnya gedung dan ruang serta terbatasnya koleksi buku perpustakaan.

Strategi yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut diantaranya adalah meningkatkan kapasitas perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan sekolah.

Selain itu, katanya, meningkatkan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan.

Ditambahkannya, rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan dae-

rah hingga bulan Juni 2012 mencapai 517.148 pengunjung.

Untuk menumbuhkan budaya gemar membaca, pihaknya juga telah melakukan pemasaran perpustakaan dengan cara menyebarkan jasa layanan bahan perpustakaan dan layanan sumber-sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan lainnya kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan bangsa.

Andriani menambahkan, pihaknya juga melakukan layanan rumah belajar dengan mengadakan bimbingan belajar/kursus, pengenalan teknologi informasi pada anak dan mengadakan arena bermain dan belajar.

Sedang untuk layanan perpustakaan keliling berupa layanan perpustakaan keliling di panti-panti, pondok pesantren dan layanan perpustakaan keliling di Lapas. (tt) foto: parle

DPR Tuntaskan Dua RUU Prioritas

DPR telah menuntaskan dua RUU Prioritas RUU yaitu RUU tentang Sistem Peradilan Anak, dan RUU tentang Pendidikan Tinggi.



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh menyerahkan Laporan Pemerintah terkait RUU Dikti kepada Ketua DPR Marzuki Alie.

“RUU Sistem Peradilan Anak menggantikan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. RUU ini dibentuk dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat menyampaikan pidato penutupan Masa Persidangan IV, di Gedung Nusantara II, Jum’at, (13/7).

Menurutnya, RUU ini menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Sementara RUU tentang Pendidikan Tinggi, terang Marzuki, memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Inti dari RUU ini adalah agar penyelenggaraan pendidikan tinggi harus didasarkan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar

akademik, dan otonomi keilmuan. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus bebas dari pengaruh politik praktis. RUU Pendidikan Tinggi adalah satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional.

RUU Ratifikasi Tentang Konvensi

Ada 4 (empat) RUU Ratifikasi tentang Konvensi yang sudah selesai dibahas oleh Dewan, di antaranya 2 (dua) RUU Ratifikasi Konvensi Anak yaitu RUU tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict), dan RUU tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Optional Protocol to the Convention on the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography).

Kedua undang-undang ini, lanjut Marzuki, menandai bentuk komitmen kita bersama dalam upaya perlindungan anak secara komprehensif dan in-

tegratif, dan kesungguhan kita semua untuk menghormati dan melindungi hak anak dalam upaya menentang perekrutan, pelatihan dan pemanfaatan anak dalam konflik bersenjata.

“Dewan berharap Pemerintah dapat mempersiapkan berbagai aspek terkait pelaksanaan dua opsional protokol ini. Dewan juga memandang perlu agar Presiden mengeluarkan instruksi terkait perlindungan anak sebagai acuan percepatan perlindungan anak di daerah, mengingat masih banyak kasus pelanggaran hak anak di daerah,”ujarnya.

Terkait dua RUU Ratifikasi Konvensi lain yang ditangani oleh Komisi I, yaitu RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, dan RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan Keamanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerjasama dalam Bidang Peralatan Logistik dan Industri Pertahanan.

Hasil pembahasan atas kedua RUU ini telah diputuskan bahwa tidak dalam bentuk UU, tetapi dalam bentuk Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan UU No. 24 tahun 2000 tentang Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional, khususnya Pasal 10 dan Pasal 11.

“Ada beberapa RUU lainnya yang belum selesai dibahas, diantaranya yaitu RUU tentang Pangan, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, RUU tentang Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU tentang Organisasi Masyarakat, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar,”ujarnya.(si)foto:wy

Komisi X DPR Harapkan NTT Menjadi Icon Pariwisata Indonesia Timur

Komisi X DPR mengharapkan NTT dapat menjadi Icon pariwisata di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu didukung dengan potensi alam NTT yang indah, dan letak geografisnya yang berbatasan antara Timor Leste dan dengan Benua Australia.

“Propinsi ini juga merupakan Propinsi yang sangat startegis, maka dari itu pemerintah sudah saatnya memberikan perhatian secara khusus bagi Propinsi ini, “ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri yang sekaligus memimpin rombongan kunjungan kerja Komisi X DPR ke Propinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (18/7).

Syamsul Bachri menegaskan, Pemerintah sudah saatnya memberikan perhatian secara khusus terhadap Propinsi NTT sebagai pusat pariwisata Indonesia setelah Propinsi Bali.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, secara tegas menyatakan, program pariwisata yang merupakan salah satu fokus utama masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, tidak menjadi prioritas. Pariwisata hanyalah urusan kedua.

“Program sektor pariwisata tetap berjalan, namun untuk menjadikan program tersebut sebagai program prioritas merupakan urusan kedua,” tegas Frans Lebu.

Meski demikian, ia juga mengaku telah memberi porsi terhadap sektor ini, dengan merumuskan grand design untuk mendorong pariwisata.

Kendati begitu, lanjutnya, ada beberapa program yang dilakukan Dinas Pariwisata NTT dalam satu tahun ke depan untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata, antara lain program pengembangan kebudayaan, promosi, dan kemitraan. Sedangkan untuk program pengembangan budaya, diimplementasikan dalam bentuk pelepasan budaya, bantuan revitalisasi kampung adat, dan memperhatikan budaya di NTT.

Menurutnya, program pariwisata di NTT sudah dicanangkan untuk

satu tahun kedepan. Ketika ditanya konsepnya terhadap masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, ia menjelaskan, bahwa dinas pariwisata NTT telah me-

nyiapkan segala potensi wisata yang ada dalam bentuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Salah satu yang dilakukan yakni Sail Komodo 2013. (Spy). foto: parle



Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri saat memberikan sambutan dalam kunjungan kerja ke NTT.

Komisi VII DPR Desak Suluttenggo Bentuk Tim Negosiator

Komisi VII DPR mendesak PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo bentuk tim negosiator. Pasalnya, banyak kasus di lapangan mobil dinas PLN dibakar dan kantor PLN diserang karena permasalahan angka pemasangan listrik yang tidak realistis dan berbeda-beda di tiap wilayah.



Suasana rapat kunjungan Komisi VII DPR dengan Jajaran Direksi PT. PLN.

pendekatan persuasif yang gagal dilakukan, untuk itu DPR tidak ingin PLN menjadi sasaran seperti kejadian-kejadian perusakan di lapangan. “Jadi tidak ada salahnya kita melakukan negosiasi dengan orang seperti itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, bisa dilakukan pendekatan persuasif terkait pemasangan listrik yang realistis. Seperti angka berapa yang lebih realistis untuk di kampung halaman agar tidak timbul kembali kesalahpahaman. “Jangan pemasangan itu disana-sini pada tiap wilayah berbeda-beda,” ujarnya.

Syarifuddin mengatakan, Komisi VII DPR yang bermitra dengan PLN sangat peduli terhadap permasalahan itu. Oleh karenanya, lanjut Syarifuddin, untuk Indonesia Timur harus ada warna tersendiri.

“Saya hanya memberikan masukan dan semangat saja kepada PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo, mudah-mudahan kejadian-kejadian di lapangan yang negatif itu tidak sering kita tonton di televisi,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, salah satu jajaran PT. PLN Persero Wilayah Suluttenggo Pikner menjelaskan, pihaknya mengakui bahwa Suluttenggo ini memang kerap terjadi tindakan anarkis yang dilakukan segelintir orang terhadap PLN. Ia mencontohkan, setidaknya ada 30.000 pelanggan dan ada 6.000 sambungan liar. “Sambungan liar itu, tidak jelas itu meterannya dari mana,” tegasnya.

Untuk itu, dalam kesempatan pertemuan dengan Komisi VII DPR, pihaknya berjanji akan memperkuat lagi jajarannya, mencari terobosan-terobosan sehingga tidak tidak kembali menjadi sasaran. “Kalau kemarin ada pemberitaan yang minor lima mungkin satu semester bisa jadi empat,” ujarnya. (iw)/foto:iwan armanias/parle.



Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali

Hal itu diungkapkan Muhammad Syarifuddin dari Fraksi PAN dalam pertemuan dengan PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo saat Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII DPR ke Provinsi Gorontalo, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR

Zainudin Amali, Senin (16/7).

“Pembentukan Tim Negosiator harus dilakukan oleh PLN, jadi jangan sampai ributnya itu di tonton lewat televisi di Jakarta,” ujar Syarifuddin.

Menurutnya, jika permasalahan itu terjadi terus menerus, berarti ada

Dunia Pendidikan di NTT Sangat Memprihatinkan

Perkembangan dunia pendidikan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih sangat memprihatinkan. Kondisinya masih serba kekurangan dan keterbatasan, seperti tidak ada fasilitas laboratorium dan buku-buku perpustakaan yang memadai bagi para siswa/i.

“Masalah pendidikan di NTT memang sangat memprihatinkan, bagaimana tidak di NTT masalah pendidikan saat ini mendapat rangking ke 33 dari 33 Propinsi yaitu berada di rangking terakhir, “ungkap Anggota komisi X DPR Muslim (Fraksi Partai Demokrat), pernyataan ini disampaikan pada saat melakukan kunjungan kerja Komisi X ke NTT, Rabu (18/7).

Muslim menegaskan, semuanya kondisinya masih serba kekurangan dan serba keterbatasan, hal inilah yang perlu mendapat perhatian semua pihak terhadap dunia pendidikan di NTT.

Dia menuturkan, dirinya dan semua Anggota Komisi X yang datang kesini pasti merasa miris setelah meninjau langsung ke sekolah sekolah yang diunggulkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan seperti SMK Negeri, SMP, SD ternyata disana tidak ada fasilitas apapun “bagaimana kondisi sekolah-sekolah yang berada di pelosok desa pasti pasti akan lebih memprihatinkan lagi.”ujarnya

Muslim mengemukakan SMK yang dianggap unggulan tidak ada fasilitasnya seperti Laboratorium yang sangat terbatas bisa dianggap tidak ada, buku-buku di Perpustakaan juga.

“Ini masih jauh dari kebutuhan yang ada bahkan ini bisa dikatakan tidak memadai, maka dari itu hal seperti ini betul-betul perlu mendapat perhatian secara khusus,”ujarnya

Menurutnya, secara keseluruhan sekolah-sekolah di Propinsi Nusa Tenggara Timur bisa dikatakan sangat tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain seperti di Sumatera, Jawa dan di daerah lain di propinsi di Indonesia.

Dikatakan juga, Komisi XDPR dalam kunjungan kerjanya ke NTT hampir



Anggota Komisi X DPR Muslim



Salah satu sekolah di NTT yang membutuhkan bantuan perbaikan

semua sekolah yang telah dikunjungi, mengatakan, masih banyaknya ruangan kelas yang minim untuk belajar bahkan ada sekolah yang setiap mengadakan rapat dengan orang tua murid selalu menggunakan tenda yang disewa oleh pihak sekolah karena tidak adanya ruangan untuk rapat dengan orang tua murid.

Lebih memprihatinkan lagi, lanjut Muslim, ada sekolah yang gurunya setiap hari mengajar sampai 6 kelas

dalam waktu yang sama. “Hal seperti ini juga perlu mendapat perhatian tentang tenaga pengajar,”paparnya.

Seluruh NTT bari 18 ribu guru yang sudah mendapatkan surat sertifikasi padahal tenaga guru di seluruh NTT diperlukan sebanyak 28 ribu guru yang seharusnya sudah mendapatkan surat sertifikasi. “ Ini juga perlu mendapat perhatian” tegas Muslim. (Spy)foto: parle

DPR Kritisi Defisit Neraca Perdagangan

DPR mengharapkan Pemerintah memberikan perhatian terkait Defisit neraca perdagangan. Pendapat itu disampaikan oleh Ketua DPR Marzuki Alie saat membacakan pidato penutupan masa persidangan IV, di Gedung Nusantara II, Jum'at, (13/7).



Ketua DPR RI Marzuki Alie menyampaikan Pidato Penutupan Masa Persidangan ke IV Tahun 2012-2013 di Gedung Nusantara II DPR RI

“Dewan menaruh perhatian terhadap masalah defisit neraca perdagangan. Kesepakatan yang dicapai dalam kebijakan defisit anggaran tahun 2013 adalah menjaga kesinambungan fiskal, serta mendukung pencapaian program-program pembangunan. Anggaran direncanakan tetap ekspansif dengan defisit antara 1,3% - 1,9% terhadap PDB. Kebijakan pembiayaan tahun 2013 untuk menutup defisit tetap bersumber dari pembiayaan utang dan non-utang,”ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah memang harus memberikan perhatian penuh mengenai defisit ini, karena saat ini defisit neraca perdagangan telah meluas ke beberapa negara mitra dagang Indonesia, termasuk Singapura, Korea Selatan dan Jepang. Peningkatan defisit ini akan dapat menekan ekspor, dan dikhawatirkan akan berlanjut sampai akhir 2012.

Dia menambahkan, Dewan akan melanjutkan pembahasan terhadap asumsi Ekonomi Makro RAPBN tahun 2013 dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2013 tersebut, pada Masa Persidangan I Tahun sidang 2012-2013 mendatang.

Pada Masa sidang ini, lanjut Marzuki, Dewan juga telah membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 yang telah disampaikan Pemerintah pada tanggal 28 Juni 2012 lalu. Sebagaimana diketahui bahwa, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2011 berisikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2011 yang telah diaudit terlebih dahulu oleh BPK RI.

“Berdasarkan hasil audit BPK RI memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” atas LKPP Tahun 2011.

Terkait dengan opini BPK atas LKPP yang masih WDP ini, Dewan mengingatkan bahwa dalam LKPP ini masih ada penggunaan keuangan negara yang bersifat material yang menyimpang dari standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundangan yang berlaku,”paparnya.

Terdapat dua permasalahan yang menyebabkan BPK RI memberi opini “Wajar Dengan Pengecualian”, yaitu: pertama, adanya permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap, kedua, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan inventarisasi, perhitungan dan penilaian terhadap Aset Eks BPPN. Dewan menilai LKPP Tahun 2011 ini sudah mencerminkan upaya Pemerintah untuk berusaha memperbaiki sistem administrasi dan pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2011. (si)foto: wy/parle

Komisi VIII Dukung Embarkasi Haji NTB

Komisi VIII DPR RI mendukung Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012 ini segera memiliki embarkasi haji sendiri. Selama ini jemaah calon haji dari daerah yang dikenal dengan julukan 'Seribu Mesjid' ini bergantung pada embarkasi Jatim yang dinilai terlalu jauh.

“Komisi VIII sudah mengupayakan Embarkasi Haji NTB disetujui. Kalau dulu harus ke Surabaya sekarang lebih mudah. Kunker kali ini kami ingin tahu bagaimana persiapannya,” kata anggota Komisi VIII dari FPDIP Ina Ammania saat melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB Zainul Majdi di Bumi Gora, Mataram, Senin (16/7/12).

Ia meminta NTB yang sudah memiliki bandara internasional dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya, terutama dari segi pembekalan bagi jemaah calon haji, termasuk sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Sementara itu anggota Komisi VIII dari FP Gerindra Sumaryati Aryoso meminta jajaran Kanwil Kemenag berupaya membangun pemahaman yang benar dari masyarakat tentang ibadah haji. “Banyak yang memaksakan diri sampai menggadaikan tanah, pulang haji malah tidak punya usaha akhirnya terjerat kemiskinan. Padahal ibadah haji itu hanya wajib bagi yang mampu,” imbuhnya.

Pimpinan sidang Ali Maschan Musa FPKB secara khusus mengingatkan masa reses DPR yang berlangsung mulai Jumat (13/7) bukanlah masa liburan.



Dialog Komisi VIII DPR dengan Gubernur NTB Zainul Majdi di Bumi Gora, Mataram

Masa reses adalah saatnya bagi wakil rakyat menjalankan fungsi pengawasan ke lapangan, ke kantor mitra kerja di daerah dan dilanjutkan ke dapil masing-masing. “Itulah yang kami lakukan NTB sekaligus bersilaturahmi dengan mitra kerja kami,” lanjutnya.

Gubernur NTB Zainul Majdi menjelaskan persiapan Embarkasi dan Debarkasi Haji di daerahnya masih terus dilakukan. Salah satu kekurangan

yang masih dicarikan jalan keluarnya adalah menyediakan asrama haji dengan daya tampung minimal setara dua kloter jemaah.

“Kita baru memiliki asrama dengan kapasitas 400 jemaah. Pemprov sudah berupaya melengkapinya namun sejauh ini masih terkendala anggaran. Kami mohon kesediaan Komisi VIII untuk kembali mendukung kami,” demikian Gubernur. (iky) foto:parle

Komisi VII DPR Kritisi Perkembangan Sektor Energi

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengatakan, sektor energi Indonesia menghadapi berbagai tantangan akibat permintaan yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan penawaran.

“Kondisi ini juga terjadi di sektor ketenagalistrikan yang mana kita masih dihadapkan pada persoalan keterbatasan penawaran hingga masih terjadi pemadaman bergilir di hampir seluruh Indonesia,”ujarnya saat menyampaikan pidatonya di Gedung Kantor Gubernur Propinsi Aceh, Selasa, (17/7).

Menurutnya, selain sektor ling-

kungan hidup isu lainnya mengenai perubahan iklim akibat pemanasan global. “Kita juga ingin mengetahui degradasi kualitas lingkungan hidup terlebih di Aceh terdapat berbagai perusahaan Migas dan pertambangan serta Industri hilir lainnya,”papar Sutan.

Dia menambahkan, Tim ingin mengetahui Pandangan pemerintah propinsi Aceh tentang pengelolaan Mi-

gas, konversi Minyak ke gas di Propinsi Aceh, dan keterlibatan BUMD terhadap pengelolaan Migas di Propinsi Aceh.

“Kita juga ingin mengetahui Progres perencanaan pembangunan sejumlah pembangkit Listrik di Aceh terakhir kondisi lingkungan hidup di Propinsi Aceh atas eksistensi Perusahaan Migas dan Pertambangan,”katanya. (si)foto: parle

PTN Kurang Lakukan Sosialisasi Bea Siswa Bidik Misi

Komisi X DPR RI menilai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kurang melakukan sosialisasi untuk subsidi siswa miskin dalam bentuk beasiswa Bidik Misi. Kurangnya sosialisasi ini berakibat alokasi tidak dapat terserap secara keseluruhan.



Anggota Komisi X DPR Rinto Subekti (paling kiri)



Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto (kanan) didampingi Rektor UNNES Sujono Sastroatmojo membahas subsidi beasiswa bagi mahasiswa/i miskin.

Seperi di Jawa Tengah, Pemerintah mengalokasikan 2.000 mahasiswa, namun sangat disayangkan anggaran yang telah dialokasikan tersebut tidak terserap semuanya.

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Rinto Subekti saat pertemuan dengan Rektor PTN dan PTS Jawa Tengah, Selasa (17/7) dalam serangkaian kunjungan kerja Komisi X ke provinsi tersebut.

Rinto mengatakan, dalam anggaran tahun 2012 Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar 32,6 triliun untuk program pengem-

bangun pendidikan tinggi di Direktorat Pendidikan Tinggi.

Tahun ini misalnya, DPR RI telah menyetujui usulan pemerintah untuk mengalokasikan hampir 1 triliun untuk subsidi siswa miskin dalam bentuk beasiswa Bidik Misi di PTN dan PTS yang mencakup sekitar 92 ribu mahasiswa miskin.

PP 66 Tahun 2010 mengamanatkan bantuan biaya pendidikan diberikan paling sedikit 20 persen dari jumlah seluruh peserta didik.

Pada tahun 2011, besarnya biaya yang diberikan kepada tiap mahasiswa

sebesar Rp 6 juta per semester, dengan rincian komponen biaya hidup RP 3,6 juta dan komponen biaya pendidikan sebesar Rp 2,4 juta.

“Tahun 2013 ini akan ditingkatkan dalam satu tahun sebesar Rp 13 juta,” kata anggota Dapil Jateng ini.

Dengan bertambahnya anggaran ini dia berharap PTN lebih gencar melakukan sosialisasi sehingga dapat lebih banyak memberikan subsidi kepada mahasiswa miskin.

Rinto menambahkan, Pemerintah Pusat juga sedang mengkaji pemberian subsidi 20 persen yang lebih banyak diberikan kepada PTN, namun kurang terserap dengan baik.

Sementara di sisi lain, banyak PTS yang sangat mengharapkan bantuan beasiswa Bidik Misi ini, namun belum mendapatkan alokasi dana tersebut.

Untuk itu, di tahun 2013 dia berharap alokasi anggaran Bidik Misi ini dapat lebih ditingkatkan sehingga yang dialokasikan untuk PTS dapat lebih besar lagi.

Senada dengan Rinto, Anggota Komisi X dari F-PPDIP Dedi Suwandji Gumelar menambahkan, jika PTN tidak dapat menyerap dengan baik, kenapa tidak diberikan porsi yang lebih besar untuk PTS.

Menanggapi beasiswa Bidik Misi ini, Rektor Universitas Negeri Semarang Sujono Sastroatmojo mengatakan, dia taat azas untuk menjalankan program Bidik Misi ini, sehingga semuanya dapat terserap dengan baik.

Tahun 2011, sebanyak kurang lebih 1.400 mahasiswa mendapat beasiswa ini dan tahun 2012 mengusulkan penambahan sebanyak 1.600 mahasiswa. “Tambahan ini akan kami manfaatkan sebaik mungkin untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu,” katanya. (tt) foto:parle

Komisi X Ingin Pulau Galang Jadi Miniatur Perkampungan Vietnam

Komisi X DPR menginginkan Pulau Galang dijadikan miniatur perkampungan Vietnam. Hal itu mengemuka saat Komisi X DPR RI melakukan peninjauan potensi obyek wisata di Pulau Galang, yang pernah dijadikan penampungan pengungsi Vietnam.

“Komisi X akan menindaklanjuti potensi Pulau Galang kepada Menteri Pariwisata,” kata anggota dari Fraksi Golkar Oelfah A.S. Hermanto, saat kunjungan kerja Komisi X di Provinsi Kepulauan Riau, Senin (16/7).

Oelfa menyayangkan kondisi yang ada di pulau tersebut, karena fasilitas yang ada sudah sebagian hancur. “Pulau Galang bisa dijadikan daerah pariwisata yang luar biasa, kalau dikelola dengan baik maka potensi wisatanya akan mendunia,” katanya.

Seperti diketahui, sekitar 250 ribu orang pengungsi perang Vietnam datang ke Pulau Galang dengan menggunakan perahu, yang kemudian ditampung dan diberikan fasilitas kehidupan oleh Pemerintah Indonesia. “Patut diketahui dunia bahwa Indonesia pernah menerima sebuah kelompok pengungsi yang maha dasyat jumlahnya dengan pendekatan kemanusiaan dan Pancasila,” jelas Oelfa.

Menurut Wakil Ketua Komisi X Asman Abnur saat memimpin kunker ini, Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap Pulau Galang. Pertama yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan pendataan mengenai status tanah pulau Galang yang seluas 80 hektar. “setelah itu dikerjasamakan atau di buat anggaran khusus untuk pengelolaan wisata Pulau Galang, kemudian promisi,” paparnya.

Selanjutnya, pemerintah dalam pengembangannya melakukan Revitalisasi terhadap bangunan dan fasilitas yang pernah ada, seperti Rumah sakit, sekolah, dan tempat tinggal pengungsi. Selain itu, perahu yang pernah digunakan hingga sampai ke pulau ini dikumpulkan seperti ada perahu yang terpencar di Anambas.



Tim Kunker Komisi X DPR dipimpin Asman Abnur berfoto bersama se usai melakukan kunjungan lapangan ke pulau galang di Propinsi Kepulauan Riau

Zulfadhli mengusulkan agar pemerintah melakukan promosi di Pulau Galang dengan mengadakan Reuni Akbar Eks Pengungsi Vietnam, dengan mengundang para relawan yang pernah terlibat didalamnya dan juga PBB.

Djamal Aziz dari Fraksi Partai Hanura mengatakan potensi Pulau Galang bukan hanya dapat dijadikan miniatur Vietnam saja, tetapi menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap persoalan di dunia. Seperti orang Syria, orang Afganistan yang sekarang sedang mengalami gejolak peperangan di negaranya, lari mengungsi dari negaranya naik perahu dan banyak yang terdampar di Tulungagung, situbondo, banyuwangi, maupun daerah lainnya di Indonesia. “Kita buktikan bahwa Indonesia peduli itu. Tampung kemudian kita masukan di sini dengan kerjasama dengan PBB,” katanya.

Pulau ini dibagi dengan petak-pe-

tak, untuk bagian tertentu adalah bukti sejarah yang pernah digunakan sebagai eks penampungan pengungsi vietnam, dan yang lainnya untuk penampungan pengungsi korban perang. “Indonesia paling peduli kepada kesulitan masyarakat dunia yang mengalami kesulitan dinegaranya,” tegas Djamal Aziz. (as) foto:as



Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur



Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengisi buku tamu Museum Tsunami, Banda Aceh. Selasa (17/07), foto : si



Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana tukar menukar cinderamata dengan Direksi PT. Arun. Rabu (18/07), foto : si



Pertemuan Komisi X DPR RI dengan Jajaran Muspida Jawa Tengah. Selasa (17/07), foto : tt



Tim Kunker Komisi VIII yang dipimpin Chairunnisa melakukan pertemuan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah. Rabu (18/07). Foto:RY



Tim Kunker Komisi VIII membeli hasil kerajinan penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Palangkaraya Kalimantan Tengah setelah melakukan pertemuan dan peninjauan di gedung Panti. Senin (16/07), foto:RY



Tim Kunker Komisi VIII yang dipimpin Chairunnisa melakukan pertemuan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah. Rabu (18/07). Foto:RY